

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

# **PENERAPAN PASAL 105 KOMPILASI HUKUM ISLAM TERHADAP HAK ASUH ANAK OLEH HAKIM DI PENGADILAN AGAMA PANGKALAN KERINCI**

## **SKRIPSI**

Diajukan Untuk Melengkapi Sebagai Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)



**OLEH**

**ANDRI SAPUTRA**

**11721102877**

**JURUSAN HUKUM KELUARGA**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

**1443H/2021M**



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PERSETUJUAN**

Skripsi dengan judul “ **Penerapan Hak Asuh Anak Oleh Hakim Di Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci Terhadap Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam**” yang ditulis oleh:

Nama : Andri Saputra  
 NIM : 11721102877  
 Program Studi : Hukum Keluarga

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 2021

Pembimbing Skripsi

**Ahmad Fauzi, SHI, MA**  
**NIP.197601232014111002**

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **“PENERAPAN PASAL 105 KOMPILASI HUKUM ISLAM TERHADAP HAK ASUH ANAK OLEH HAKIM DI PENGADILAN AGAMA PANGKALAN KERINCI”**, yang ditulis oleh:

Nama : **ANDRI SAPUTRA**  
NIM : **11721102877**  
Program Studi : **Hukum Keluarga**

Telah dimunaqasyahkan pada :

Hari / Tanggal : **Kamis, 14 Oktober 2021**  
Waktu : **08.00 WIB**  
Tempat : **Ruang Munaqasyah/Offline**

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 29 Oktober 2021  
**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

Ketua (Penguji I)  
**Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc. MA**

Sekretaris (Penguji II)  
**Muslim, S. Ag. S.H. M. Hum**

Penguji III  
**Khairul Amri, M. Ag**

Penguji IV  
**Mardiana, MA**



Mengetahui :  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



**Dr. H. Zulkifli, M. Ag.**  
NIP. 19741006 200501 1 005





Lampiran Surat :

Nomor : Nomor 25/2021

Tanggal : 10 September 2021

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : ANDRI SAPUTRA  
 NIM : 11721102877  
 Tempat/Tgl. Lahir : Sialang godang 13 Juni 1999  
 Fakultas/Pascasarjana : Syariah dan hukum  
 Prodi : Hukum keluarga  
 Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya\*:

Penerapan hak asuh anak oleh hakim  
 di Pengadilan agama Pangkajene Leneke  
 terhadap pasal 105 kompilasi hukum Islam

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya\* dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya\* saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya)\* saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 17 September 2021

Yang membuat pernyataan



ANDRI SAPUTRA

NIM : 11721102877

\*pilih salah satu sesuai jenis karya tulis



## ABSTRAK

**Andri Saputra : Penerapan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam Terhadap Hak Asuh Anak Oleh Hakim Di Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci**

Negara Indonesia sebagai negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bertujuan mewujudkan tatanan kehidupan negara dan bangsa yang sejahtera, aman, tentram serta tertib. Dalam tatanan kehidupan yang demikian itu dijamin persamaan kedudukan warga masyarakat dalam hukum, akan tetapi berbagai fungsi untuk menjamin kesamaan dan kedudukan tersebut serta hak perseorangan dalam masyarakat harus disesuaikan dengan pandangan hidup serta kepribadian negara dan bangsa berdasarkan Pancasila sehingga tercapainya keserasian, keseimbangan serta keselarasan antara kepentingan perseorangan dengan kepentingan masyarakat.

Dalam penelitian ini masalah yang akan diteliti adalah: Bagaimana Penerapan pasal 105 KHI tentang Hak Asuh Anak di PA. Pangkalan Kerinci. Kemudian bagaimana kedudukan pasal 105 KHI terhadap Hak Asuh Anak di PA. Pangkalan Kerinci. Adapun jenis penelitian yang dilakukan penulis merupakan penelitian lapangan yang menggunakan metode penelitian kualitatif. Sedangkan teknik pengumpulan data yang dilakukan menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Analisis yang digunakan adalah metode analisis dan induktif yaitu metode yang menekankan pada pengamatan, kemudian menarik kesimpulan berdasarkan pengamatan tersebut. Sesuai dengan penelitian diatas, peneliti menghasilkan kesimpulan yaitu: Bahwa penerapan pasal 105 KHI di Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci mengacu kepada kronologis perkara, fakta hukum serta peristiwa hukum yang terbukti dan muncul dalam persidangan sehingga penerapan pasal 105 KHI tidak diterapkan secara serta merta melainkan melihat aspek-aspek yang lain. Kemudian yang selanjutnya Bahwa kedudukan Pasal 105 KHI secara tekstual mengatur, bahwa bagaimanapun ibu mempunyai hak mutlak untuk mendapatkan hak asuh anak pasca perceraian. Namun apabila hal ini dipaksakan secara kaku maka hukum tidak menjadi solusi bagi masyarakat, sehingga syarat utama yang perlu dipenuhi agar Pasal 105 KHI tercapai tujuan dan maksudnya maka ibu sebagai pemegang amanah secara aturan harus bisa menunjukkan segala sesuatu utamanya perilaku yang bisa menjamin keberlangsungan hidup anak.

**Kata Kunci: Penerapan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam**



## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah berkat rahmat, taufik serta hidayah dari Allah SWT, akhirnya penulis dapat menyelesaikan proses penyusunan skripsi ini dengan judul ***Penerapan Pasal 105 Terhadap Hak Asuh Anak Oleh Hakim Di Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci).***

Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW sebagai pendidik sejati bagi seluruh umat manusia.

Dengan terselesainya penyusunan skripsi ini, sudah selayaknya penulis menyampaikan banyak terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada semua pihak yang telah membantu penulis, terutama yang terhormat :

1. Ayahanda ( Samsuar) dan ibunda (Emi) tercinta yang telah memberikan dukungan serta bimbingan dan bekal ilmu pengetahuan serta kasih sayang sekaligus pengorbanan baik secara moril maupun materil demi keberhasilan saya dalam menyelesaikan studi di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
2. Bapak Prof. Dr. Khairunnas, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Bapak Dr. Zulkifli, M. Ag, serta Wakil Dekan I Bapak Dr. H.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

- Erman, M. Ag, Wakil Dekan II Bapak Dr. H. Mawardi, M. Si dan Wakil Dekan III Ibu Dr. Sofia Hardani, M. Ag.
4. Ketua Jurusan Hukum Keluarga Bapak H. Akmal Abdul Munir, Lc, MA dan Sekretaris Jurusan Bapak Ahmad Fauzi, SHI., MA dan seluruh Dosen di Fakultas Syariah dan Hukum yang telah memberikan banyak ilmu kepada penulis.
5. Bapak Ahmad Fauzi, SHI., MA selaku pembimbing dalam penulisan skripsi ini yang telah banyak memberikan masukan dan perbaikan agar lebih baik dan atas segala sikap yang penuh kesabaran dan motivasi yang tulus kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak Dr.Abu Samah, MH selaku Penasehat Akedemis yang telah membimbing selama menuntut ilmu di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
7. Ketua Pengadilan Agama (PA) Pangkalan Kerinci yang telah memberikan izin penulis untuk melakukan penelitian di Pengadilan Agama (PA) Pangkalan Kerinci.
8. Hakim Pengadilan Agama (PA) yang memberikan kesempatan dan waktu penulis dalam menggali data demi terselesainya skripsi ini.
9. Teman-teman angkatan 2017 khususnya AH D yang telah memberikan masukan dan saran selama penulisan skripsi.
10. Kepada semua pihak yang telah membantu dan memberikan dorongan sehingga dapat memperlancar selesainya penulisan skripsi ini.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat kekurangan yang membutuhkan kritikan yang sifatnya konstruktif demi kesempurnaan karya ilmiah ini. Akhirnya penulis berharap semoga karya ilmiah ini bermanfaat bagi penulis dan juga bagi pembaca. *Aamiin yaa Rabbal'Alamin*.

Pekanbaru, 05 Mei 2021  
Penulis,

**ANDRI SAPUTRA**  
**NIM. 11721102877**





1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>v</b>
<b>BAB I      PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	11
C. Rumusan Masalah .....	12
D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian.....	12
E. Metode penelitian .....	13
F. Sistematika Penulisan.....	17
<b>BAB II      GAMBARAN LOKASI PENELITIAN DAN ISI PUTUSAN HAKIM NOMOR 307/Pdt.G/2019/PA.Pkc</b>	
A. Profil Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci.....	19
B. Isi Putusan Hakim Di Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci Nomor 307/Pdt.G/2019/PA.Pkc .....	21
<b>BAB III      KAJIAN TEORI</b>	
A. Latar belakang pembentukan KHI.....	24
B. Landasan dan kedudukan KHI .....	27
C. Eksistensi KHI di pengadilan agama .....	31
D. Subtansi pasal 105 KHI.....	32
E. Hadanah.....	34
F. Tinjauan umum keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan .....	40
<b>BAB IV      HASIL PENELITIAN</b>	
A. Alasan Mengapa Hakim Menetapkan Ayah Sebagai Pemegang Hak Asuh Anak Dalam Putusan Nomor 307/Pdt.G/2019/PA.Pkc Pasca Perceraian .....	45

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Kedudukan Pasal 105 KHI dalam Perkara Hak Asuh Anak di Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci Nomor 307/Pdt.G/2019/PA.Pkc .....	54
--	----

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	57
B. Saran .....	57

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia sebagai negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bertujuan mewujudkan tatanan kehidupan negara dan bangsa yang sejahtera, aman, tentram serta tertib. Dalam tatanan kehidupan yang demikian itu dijamin persamaan kedudukan warga masyarakat dalam hukum, akan tetapi berbagai fungsi untuk menjamin kesamaan dan kedudukan tersebut serta hak perseorangan dalam masyarakat harus disesuaikan dengan pandangan hidup serta kepribadian negara dan bangsa berdasarkan Pancasila sehingga tercapainya keserasian, keseimbangan serta keselarasan antara kepentingan perseorangan dengan kepentingan masyarakat.<sup>1</sup>

Negara Indonesia sebagai negara yang berdasarkan hukum maka seluruh aspek kehidupan masyarakat diatur oleh hukum termasuk mengenai perkawinan, perceraian, dan kewarisan. Lahirnya Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang diundangkan pada tanggal 2 Januari 1974, yang mulai berlaku efektif sejak tanggal 1 Oktober 1975 merupakan salah satu bentuk hukum di Indonesia tentang perkawinan beserta akibat hukumnya.

---

<sup>1</sup> Budi Winarno, *Sistem Politik Indonesia Era Reformasi*, (Medpress (Anggota IKAPI), Yogyakarta, 2008), h. 6.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa,<sup>2</sup> kemudian Kompilasi Hukum Islam Pasal 2 menjelaskan bahwa perkawinan menurut hukum islam adalah pernikahan atau akad yang sangat kuat atau mithaqan ghalidan untuk menaati perintah Allah, dan melaksanakannya merupakan ibadah. Sedangkan Pasal 3 menjelaskan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah.<sup>3</sup>

Perkawinan merupakan salah satu perintah agama kepada yang mampu untuk segera melaksanakannya. Karena perkawinan dapat mengurangi kemaksiatan, baik dalam bentuk penglihatan maupun dalam bentuk perzinaan. Orang yang berkeinginan untuk melakukan pernikahan, tetapi belum mempunyai persiapan bekal (fisik dan nonfisik) dianjurkan oleh Nabi Muhammad saw. untuk berpuasa. Orang berpuasa akan memiliki kekuatan atau penghalang dari berbuat tercela yang sangat keji, yaitu perzinaan.<sup>4</sup>

Pernikahan sesuai dengan syariat Islam adalah dalam rangka menjaga kehormatan diri sendiri dan pasangan agar tidak terjerumus ke dalam hal-hal yang diharamkan, menjaga komunitas manusia dari kepunahan, dengan terus melahirkan dan mempunyai keturunan, menjaga kesinambungan garis keturunan, menciptakan keluarga yang merupakan dari masyarakat,

<sup>2</sup> Himpunan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974, *Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam*, (Grahamedia Press, 2014), h. 3.

<sup>3</sup> Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: CV Nuansa Aulia), h.

2.

<sup>4</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), h. 7.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menciptakan sikap bahu-membahu antar suami isteri untuk mengemban beban kehidupan, sebuah akad kasih sayang dan tolong-menolong di antara golongan, dan penguat hubungan antar keluarga.<sup>5</sup>

Selanjutnya dalam KHI pasal 116 menjelaskan perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal di luar kemampuannya.
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara lima (5) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri.
- f. Antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
- g. Suami melanggar taklik talak.
- h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Bahwa permasalahan tersebut tidak hanya berhenti pada kondisi

<sup>5</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adilatuhu*, Jilid 9, (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 40-41.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tersebut, bahkan dengan adanya perceraian tersebut bisa berdampak kepada masalah seperti halnya harta gono gini, bahkan berkaitan dengan hak asuh anak juga menjadi konsekuensi dari adanya perkara perceraian tersebut, sebagaimana yang terdapat dalam Gugatan Hadhanah yang terjadi di Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci.<sup>6</sup>

Menurut Pasal 1 butir 5 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut demi kepentingannya. Menurut Pasal 1 Angka 1 UU No. 23 Tahun 2002 Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Anak menurut UU Pasal 1 (2) No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum pernah kawin.

Sementara dalam Pasal 98 (1) KHI dikatakan bahwa batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah usia 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan. Pengertian ini bersandar pada kemampuan anak, jika anak telah mencapai umur 18 tahun, namun belum mampu menghidupi dirinya sendiri, maka ia termasuk kategori anak. Namun berbeda apabila ia telah melakukan perbuatan hukum, maka ia telah dikenai peraturan hukum atau perundang-undangan.

---

<sup>6</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, 8 (Bandung : PT. Almaarif 1980), h. 160.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Pasal 45 ayat (1) dan ayat (2) UU Perkawinan memuat ketentuan bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik baiknya. Kewajiban tersebut berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus. Jadi, kewajiban orang tua memelihara dan mendidik anak-anaknya sampai mereka kawin dan dapat berdiri sendiri. Ini juga berarti bahwa meskipun anak sudah kawin, tetapi dalam kenyataannya belum dapat berdiri sendiri, masihtetap merupakan kewajiban orang tua untuk memelihara anak dan cucunya, walaupun terjadi perceraian yang memutuskan ikatan perkawinan kedua orang tuanya.

Hal yang harus dipertahankan setelah terjadi perceraian antara kedua orangtua adalah kesadaran untuk tetap menjaga dan tidak mengurangi sekecil apapun hak-hak yang semestinya harus diberikan kepada anak. Akibat secara langsung bagi anak-anak yang menjadi korban perceraian adalah dengan tidak tinggal lagi bersama kedua orang tuanya, dimana anak secara otomatis akan tinggal bersamasalah satu orang tua dari si anak tersebut. Akibatnya rawan sekali kelalaian-kelalaian terhadap kewajiban yang semestinya harus dilakukan oleh orang tua terhadap anak untuk memberikan apa yang semestinya diberikan, demi untuk menunjang tumbuh kembang si anak secara wajar.

Menurut ketentuan hukum perkawinan meskipun telah terjadi perceraian antara suami-isteri, maka masih tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anak mereka yang semata-mata ditujukan bagi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

kepentingan anak. Dalam pemeliharaan tersebut walaupun pada praktiknya dijalankan oleh salah seorang dari mereka, tidak berarti bahwa pihak lainnya terlepas dari tanggung jawab terhadap pemeliharaan tersebut.<sup>7</sup>

Menurut Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam Dalam hal terjadinya perceraian maka berlaku :

- a. Pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya.
- b. Pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya.
- c. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.

Pasal 149 KHI huruf (d) juga menyebutkan sebagai berikut: Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan biaya hadanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun.

Selanjutnya pada Pasal 156 KHI menjelaskan sebagai berikut : Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah :

- a. Anak yang belum *mumayyiz* berhak mendapatkan hadlanah dari ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh:
  1. Wanita-wanita dalam garis lurus dari ibu.
  2. Ayah.
  3. Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah.

<sup>7</sup> Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2004), h. 295-296



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

#### State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

4. Saudara perempuan dari anak bersangkutan.
5. Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ibu.
6. Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari bapak.
- b. Anak yang sudah mumayyiz berhak memilih untuk mendapatkan hadhanah dari ayah atau ibunya.
- c. Apabila pemegang hadhanah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan hadhanah telah tercukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan, Pengadilan Agama dapat memindahkan hak hadhanah kepada kerabat lain yang mempunyai hak hadhanah.
- d. Semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21) tahun
- e. Bilamana terjadi perselisihan mengenai hadhanah dan nafkah anak, Pengadilan Agama memberikan putusannya berdasarkan huruf (a), (b), (c), dan (d).
- f. Pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya. Dalam pembahasan ini hanya di batasi mengenai Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam berdasarkan Inpres Nomor 1 Tahun 1991. Sebagaimana telah dikemukakan pada pendahuluan bahwa di dalam pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menyatakan “Pemeliharaan anak

yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 (dua belas) tahun adalah hak ibunya”.

Penulis berasumsi pasal ini masih multi tafsir terutama pada kata “Mumayyiz”, karena baik didalam alquran maupun hadits dan literatur-literatur fiqh tidak menyebutkan secara tegas berapa usia sebenarnya seseorang bisa dikatakan telah “Mumayyiz”. Disamping itu pasal tersebut memakai kata “atau”, hal ini bisa ditafsirkan adanya pilihan hukum mengenai batas usia seseorang dikatakan telah “Mumayyiz”.

Kalaupun kata “Mumayyiz” dan “atau” dihilangkan dalam pasal tersebut sehingga menjadi “Pemeliharaan anak yang belum berumur 12 (dua belas) tahun adalah hak ibunya”, apakah yang menjadi dasar hukumnya sehingga batas usia 12 (dua belas) tahun tersebut dikatakan seorang anak telah mumayyiz. Selanjutnya Pasal 105 KHI huruf (b) dinyatakan bahwa “Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya”.

Pasal ini mempunyai korelasi dan tidak dapat dipisahkan dengan Pasal 105 huruf (a) KHI, artinya seorang anak yang telah berusia minimal 12 tahun mempunyai hak khiyar (memilih) hadhanah apakah ingin diasuh dan/atau dipelihara oleh ayahnya atau ibunya. Begitu juga dalam Pasal 105 huruf (c) KHI disebutkan bahwa “biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh ayahnya”, maksud dalam pasal ini kurang lebih adalah tidak menjadi persoalan apakah anak tersebut dalam huruf (a) dan (b) pasal 105 KHI tersebut dipelihara oleh ayah atau ibunya biaya pemeliharaan tetap ditanggung oleh ayahnya sampai

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

anak tersebut berumur 21 tahun atau telah menikah sebagaimana pasal 45 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan serta pasal 149 huruf (d) dan pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam.<sup>8</sup>

Hal tersebut dapat di lihat dalam perkara NO. 307/pdt.G/2019/PA.Pkc, Di mana Pemohon dengan surat permohonannya mengajukan cerai terhadap termohon tanggal 01 Agustus 2019 yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangakalan Kerinci Tanggal 01 Agustus 2019 dengan dalil sebagai berikut:

Bahwa pada tanggal 05 Maret 2010, Pemohon dengan Termohon melansungkan pernikahan yang di catat oleh pegawai pencatat nikah kantor urusan agama (KUA) Kabupaten Padang, Provinsi Sumatera Barat, Sesuai dengan buku kutipan akta nikah tanggal 05 Maret 2010, Yang di keluarkan oleh KUA Kabupaten Padang, Provinsi Sumatera Barat.

Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua termohon selama 3 hari, Kemudian pindah kerumah kontakkan di Kabupaten Pelalawan selama lebih kurang 6 bulan, Kemudian pindah ke Kabupaten Pelalawan sampai tanggal 20 Juli 2019, Setelah itu pemohon dan termohon terpisah sampai sekarang.

Bahwa selama ikatan pernikahan pemohon dan termohon telah melakukan hubungan layaknya suami istri dan telah di karunia 2 orang anak yang bernama Anak I pemohon dan termohon, Lahir tanggal 26 Mei 2011,

---

<sup>8</sup> Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Akademia Presindo, 2007) h. 293.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Anak II Pemohon dan termohon, Lahir tanggal 03 Mei 2012, Anak-Anak tersebut saat ini ikut bersama pemohon.

Bahwa keadaan rumah tangga pemohon dan termohon pada mulanya berjalan harmonis, Akan tetapi semenjak tahun 2017, Rumah tangga pemohon dan termohon sudah tidak harmonis lagi, Sering terjadi perselisihan dan pertengkaran hal ini di sebabkan oleh karena termohon selingkuh dengan laki-laki lain, Dan termohon tidak berlaku jujur dan sering membohongi pemohon.

Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut, sejak tanggal 20 Juli 2019, Antara pemohon dan termohon pisah rumah sampai sekarang, Pemohon tinggal di tempat tinggal bersama di Kabupaten Pelalawan, Sedangkan termohon sekarang beralamatkan di rumah saudara (Adik) termohon di Kabupaten Pelalawan.

Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan pemohon dengan termohon akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa keadaan rumah tangga seperti di jelaskan di atas pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama termohon, Untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang.

Bahwa pemohon dan termohon memiliki 2 orang anak yang bernama Anak I Pemohon dan termohon, Lahir tanggal 26 Mei 2011, Dan Anak II pemohon dan termohon, Lahir Tanggal 03 Mei 2012, Kedua anak tersebut masih di bawah umur yang perlu perhatian, Bimbingan dan kasih sayang kedua orang tua, Dan termohon sebagai ibu dari kedua anak tersebut telah lalai menjaga dan merawat serta memberi kasih sayang terhadap anak-anaknya,

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Termohon begitu tega meninggalkan anak-anak tersebut di waktu pemohon sedang bekerja, Termohon pergi bersama laki-laki selingkuhannya, Pemohon sangat menghawatirkan jika nanti terjadi perceraian kedua anak tersebut hak asuh di ambil oleh termohon.

Bahwa pemohon memintah kepada majelis hakim pengadilan Agama Pangkalan Kerinci supaya kedua anak tersebut di bawah asuhan hadhanah pemohon.

Maka berdasarkan paparan di atas, penulis sangat tertarik untuk meneliti hal ini lebih lanjut. Bagaimanakah hakim di Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci dalam memutuskan perkara yang berhubungan dengan hak pengasuhan anak di antaranya:

- a. Anak yang belum mumayyiz.
- b. Anak yang telah mumayyiz.

Sebagaimana pasal 105 KHI, apakah hakim akan memutuskan perkara berdasarkan landasan kepada pasal tersebut, maka dari itu peneliti ingin lebih mengembangkan dalam bentuk kajian dan sajian ilmiah atau skripsi dengan judul. “ **Penerapan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam Terhadap Hak Asuh Anak Oleh Hakim Di Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci (Studi kasus di Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci)**”.

#### B. Batasan Masalah

Agar pembahasan dalam penelitian ini terfokus pada pokok permasalahannya adalah batasan masalah tersebut adalah penerapan pasal 105 kompilasi hukum islam terhadap hak asuh anak oleh hakim di pengadilan

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

agama pangkalan kerinci, yang berhubungan dengan anak yang belum mumayyiz dan anak yang telah mumayyiz.

### C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang dan kenyataan di atas tersebut, maka penulis dapat menuliskan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Penerapan pasal 105 KHI tentang Hak Asuh Anak di Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci?
2. Bagaimana kedudukan pasal 105 KHI terhadap Hak Asuh Anak di Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci?

### D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

- a. Adapun tujuan peneliti dalam pembuatan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk melihat, mengetahui dan memperdalam pengetahuan dalam kaitannya dengan Penerapan Pasal 105 KHI di Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci.
2. Untuk memperdalam pengetahuan tentang bagaimana kedudukan pasal 105 KHI terhadap Hak Asuh Anak di Pengadilan Agama Pangkalan kerinci.

- b. Adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan tentang Penerapan pasal 105 KHI di Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Secara praktis penelitian ini diharapkan bisa memberikan sumbangan ilmu pengetahuan, khususnya bidang hukum sehingga bisa memperkaya khazanah keilmuan di Indonesia dan sekaligus bisa menjadi rujukan bagi mahasiswa Syariah dan Hukum, khususnya program studi Jurusan Hukum Keluarga Islam dan penegak hukum serta para praktisi di bidang hukum dalam memutuskan masalah yang serupa dalam kehidupan sehari-hari.

### E. Metode Penelitian

Adapun untuk metode penelitian proposal ini terdiri dari:

#### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). penelitian dilakukan dengan pengambilan sumber data dari pengadilan Agama Pangkalan Kerinci, tentang Penerapan pasal 105 kompilasi hukum Islam terhadap hak asuh oleh hakim di pengadilan agama Pangkalan Kerinci. Sehingga dapat menjawab persoalan yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah.

#### 2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini bersifat penelitian lapangan (*Field Research*), di mana penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci, adapun alasan penulis memilih lokasi ini karena penulis ingin mengetahui bagaimana Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci dalam memutuskan perkara tentang pengasuhan anak, terkait dengan pasal 105 kompilasi hukum Islam.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### 3. Subjek dan Objek Penelitian

#### a. Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah orang-orang yang terlibat di dalam penelitian, yaitu Hakim di Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci.

#### b. Objek Penelitian

Objek yang akan di kaji dalam penelitian ini adalah Penerapan pengasuhan anak oleh hakim di Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci terhadap pasal 105 kompilasi hukum islam.

### 4. Sumber Data Penelitian

Sumber data adalah subjek dimana data dapat di peroleh. Data merupakan salah satu unsur yang sangat penting dalam penyusunan laporan.

Data yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

#### a. Sumber Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama. Adapun data ini diperoleh langsung melalui sebuah proses pengamatan (observasi) dan wawancara terhadap subjek yang dituju. Sumber primer ini berupa buku-buku yang berisi tentang informasi-informasi yang membahas masalah hadhanah. Di Antaranya adalah:

1. Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama dalam Sistem Hukum  
Penulis Cik Hasan Bisri
2. Fiqh Munakahat Penulis Abdul Rahman Ghazaly



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber yang diperoleh, dibuat dan merupakan pendukung dari sumber utama dan sifatnya tidak langsung<sup>9</sup> Adapun bahan hukum sekunder pada penelitian ini adalah seperti rancangan Undang-undang, buku-buku, atau pendapat pakar hukum. Diantaranya adalah :

1. Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Penulis Abdurrahman.

c. Sumber Data Tersier

Data tersier adalah tersier adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus dan ensiklopedi.<sup>10</sup>

5. Teknik Pengumpulan Data

Untuk pengumpulan data yang akurat dengan guna mengungkapkan permasalahan dalam penelitian ini, penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi adalah suatu proses melihat, mengamati, dan mencermati secara sistematis untuk suatu tujuan tertentu. Observasi ialah suatu kegiatan yang mencari data yang dapat digunakan untuk memberi suatu kesimpulan. Dalam hal ini peneliti melakukan pengamatan langsung ke Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan

<sup>9</sup> Chalid Narbuko, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, Cet. III, 2001), hal.43.

<sup>10</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012),

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

untuk mendapatkan gambaran secara nyata tentang permasalahan yang diteliti.

b. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tatap muka dan tanya jawab langsung antara pengumpulan data maupun peneliti terhadap sumber data. Wawancara yang digunakan adalah tanya jawab oleh penulis terhadap Hakim.

c. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu sejumlah besar fakta dan data tersimpan dalam bahan terbentuk dokumentasi serta mengumpulkan data-data yang ada dalam penelitian.<sup>11</sup>

6. Analisis Data

Untuk mengelola dan menganalisis data yang telah dikumpul, maka penulis menggunakan beberapa metode, yaitu:

- a. Metode deduktif adalah suatu uraian penulisan diawali dengan menggunakan kaidah-kaidah umum. Kemudian dianalisa dan di ambil kesimpulan secara khusus.
- b. Metode induktif adalah metode yang digunakan dalam berpikir dengan bertolak dari hal-hal khusus ke umum.
- c. Metode deskriptif adalah suatu uraian penulisan yang menggambarkan secara utuh dan apa adanya tanpa mengurangi dan menambahnya sekalipun keadaan yang sebenarnya.<sup>12</sup>

<sup>11</sup>Amzie, *Analisis Data Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), Cet. ke-1 h, 14.

<sup>12</sup>Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012),hal. 119.

## **F. Sistematika Penulisan**

Untuk memudahkan pembahasan dan mendapatkan gambaran yang jelas mengenai skripsi ini, maka penulis akan membuat sistematika penulisan sebagai berikut:

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini terdiri dari sub bab, yaitu: Latar Belakang Masalah, Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Teknik Pengumpulan Data, Analisis Data, dan Sistematika Penulisan.

### **BAB II : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN DAN ISI PUTUSAN HAKIM NOMOR 307/Pdt.G/2019/PA.Pkc**

- A. Profil PA PANGKALAN KERINCI KABUPATEN PELALAWAN: berisikan tentang Sejarah dan Visi Misi.
- B. Isi Putusan Hakim Di Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci Nomor 307/Pdt.G/2019/PA.Pkc.

### **BAB III : KAJIAN TEORI**

Penulis Akan Uraikan Tentang Kajian Teori tentang KHI dan Hak Asuh Anak.

### **BAB IV : HASIL PENELITIAN**

- A. Alasan terhadap hasil penelitian peneliti di Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci.
- B. Analisa terhadap bagaimana kedudukan pasal 105 KHI dalam penerapan hak asuh anak oleh Hakim di Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci Nomor 307/Pdt.G/2019/PA.Pkc.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## **BAB V : PENUTUP**

Merupakan tahap akhir dari penulisan skripsi yang berisi kesimpulan dan saran.

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **LAMPIRAN**





1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN DAN ISI PUTUSAN

#### HAKIM NOMOR 307/Pdt.G/2019/PA.Pkc

##### A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci

###### 1. Sejarah Berdirinya Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci

Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci diambil nama salah satu Kecamatan yang ada di Kabupaten Pelalawan, Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci pada awalnya merupakan Balai Sidang Pengadilan Agama Bangkinang, tetapi setelah adanya pemekaran wilayah Kabupaten Kampar, menjadi 4 Kabupaten yakni, Kabupaten Kampar, Rokan Hulu, Rokan Hilir dan Pelalawan, maka Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci sudah berdiri sendiri seperti Pengadilan Agama lainnya.

Dengan keluarnya Undang-Undang Nomor : 53 tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Pelalawan dan diresmikan oleh Mandagri pada tanggal 12 Oktober 1999 dengan ibukota Pangkalan Kerinci untuk memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor : 7 tahun 1999, maka pada tahun 2000 Pengadilan Tinggi Pekanbaru mengusulkan kepada Pemerintah Republik Indonesia untuk meresmikan pengadilan agama pangkalan kerinci Pada tahun 2000.

Kemudian Presiden Republik Indonesia mengeluarkan Kepres Nomor : 179 tahun 2000 tentang pembentukan Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci dan diresmikan pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2001 oleh Bapak Drs. Wahyu Widiana, yang ketika itu menjabat sebagai Direktur Jendral

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Bimbingan Peradilan Agama Islam Departemen Agama Republik Indonesia dan pada hari itu juga dilantik Ketua Pengadilan pertama yakni Drs. Harun S, S.H oleh Bapak Drs. H. Habiburrahman, M. Hum. yang waktu itu menjabat sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru, dengan jumlah pegawai sebanyak 14 (empat belas) orang yang terdiri dari Hakim, Panitera, Pejabat Struktural dan Fungsional serta wilayah hukumnya meliputi 10 Kecamatan yang ada di Kabupaten Pelalawan yang dalam perkembangannya menjadi 12 Kecamatan.

Wilayah Hukum Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan meliputi 12 Kecamatan yaitu: Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kecamatan Langgam, Kecamatan Pangkalan Kuras, Kecamatan Pangkalan Lesung, Kecamatan Ukui, Kecamatan Bunut, Kecamatan Pelalawan, Kecamatan Kerumutan, Kecamatan Teluk Meranti, Kecamatan Bandar Sekijang, Kecamatan Bandar Petalangan, dan Kecamatan Kuala Kampar.

Adapun urutan Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci sejak pertama kali berdiri adalah sebagai berikut:

1. Drs. H. Harun S, S.H., M.H. tahun 2001 sampai tahun 2004
2. Drs. H. Maharnis, S.H., M.H. tahun 2004 sampai tahun 2008
3. Drs. H. Dasril, M.H. tahun 2008 sampai tahun 2010
4. Drs. H. Kamaruddin MY, M.H. tahun 2010 sampai tahun 2012
5. Dra. Hj. Milfanetti, M.H.I. tahun 2012 sampai tahun 2014
6. Dra. Emaneli, M.H. tahun 2014 sampai tahun 2018
7. Baginda, S. Ag., M.H., tahun 2018 sampai 2020
8. Dr. H. Faisal Saleh, Lc., M.Si. tahun 2020 sampai sekarang

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci masih terus berbenah diri untuk meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana fisik serta berbagai sumber daya lain yang dimiliki guna turut serta dalam Program Reformasi Birokrasi di Bidang Hukum sebagaimana telah dicanangkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia, dimana salah satunya ialah memberikan akses seluas-luasnya dalam rangka keterbukaan lembaga peradilan kepada seluruh masyarakat pencari keadilan.

**2. Visi dan Misi Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci**

**a. Visi**

Terwujudnya Badan Peradilan Agama Yang Agung

**b. Misi**

1. Meningkatkan Professionalisme Aparatur Peradilan Agama
2. Mewujudkan Manajemen Peradilan Agama Yang Modern
3. Meningkatkan Sistem Pemberkasan Perkara Kasasi dan Peninjauan Kembali
4. Meningkatkan Kajian Kesyariatian Sebagai Sumber Hukum Materil Peradilan Agama.<sup>13</sup>

**B. Isi Putusan Hakim Di Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci Nomor 307/Pdt.G/2019/PA.Pkc**

Pasal 105 KHI menyebutkan bahwa hak asuh pemeliharaan anak yang belum mumayyiz (12 tahun) merupakan hak ibunya, namun dalam

<sup>13</sup> <https://www.pa-pangkalankerinci.go.id/tentang-pengadilan/profile-pengadilan/sejarah-pengadilan>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Putusan Nomor 307/Pdt.G/2019/PA.Pkc menjadi hak ayahnya, berikut peneliti paparkan isi putusan Hakim Nomor 307/Pdt.G/2019/PA.Pkc:

Menimbang, bahwa pemohon memberikan jawaban secara tertulis yang pada intinya menyatakan agar kedua anak pemohon dan termohon di tetapkan dalam asuhan pemohon dan pemohon tidak mau membayar tuntutan termohon karena tidak ada landasan hukumnya.

Menimbang, bahwa sesuai pasal 156 KHI huruf(a) menyebutkan “Anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya. Kemudian huruf (c) “Apabila ternyata hak hadhanah tidak dapat menjamin keselamatan jasmani rohani anak, meskipun biaya nafka dan hadhanah telah di cukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan pengadilan agama dapat memindahkan hak hadhanah kepada kerabat lain yang mempunyai hak hadhanah pula.

Menimbang, bahwa meskipun termohon yang paling utama memegang hak hadhanah terhadap anak pemohon dan termohon, akan tetapi fakta di persidangan menunjukkan termohon tidak membantah bahwa termohon telah meninggalkan anak-anak pemohon dan termohon sehari-hari tanpa komunikasi, tindakan termohon ini telah mengutamakan emosi dan keinginannya di bandingkan kasih sayang terhadap anak-anaknya sendiri.

Menimbang, bahwa dengan tindakan termohon telah nyata kurangnya kepedulian termohon terhadap anaknya sendiri, apabila hal ini sering berulang di masa yang akan datang akan menimbulkan hal yang tidak baik terhadap anak.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Meskipun Pemohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah atas anak, namun Pemohon tetap harus memberi kesempatan kepada Termohon untuk bertemu dengan anak tersebut guna mencurahkan kasih sayangnya. Jika Pemohon tidak memberi akses kepada Termohon untuk bertemu dengan anaknya, maka hal ini dapat dijadikan alasan bagi Termohon untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah.

Kemudian dengan pertimbangan-pertimbangan di atas barulah hakim menetapkan:

Bahwa anak yang bernama anak I pemohon dan termohon, lahir tanggal 26 Mei 2011 dan anak II Pemohon dan Termohon, lahir tanggal 03 Mei 2012 di bawah asuhan Pemohon”.<sup>14</sup>

---

<sup>14</sup> Putusan Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci Nomor 307/Pdt.G/ 2019/ PA.Pkc.

### BAB III

## KAJIAN TEORI

### A. Latar Belakang Pembentukan KHI

Pemikiran pemerintah dalam mengeluarkan Kompilasi Hukum Islam adalah karena hukum Islam yang dipergunakan oleh peradilan agama untuk menyelesaikan sengketa yang diajukan ke Pengadilan Agama di masa yang lalu, terdapat dalam berbagai kitab fiqh yang ditulis oleh para fuqaha beberapa abad yang lalu. Sebagai kitab fiqh, di dalamnya terdapat perbedaan-perbedaan pendapat di antara para fuqaha yang satu dengan yang lainnya.

Perbedaan- perbedaan yang terdapat dalam kitab-kitab fiqh itu wajar mempengaruhi Hakim Pengadilan Agama dalam memutuskan sengketa sehingga sering terjadi putusan hakim pada suatu Pengadilan Agama berbeda dengan putusan hakim pada Pengadilan Agama yang lain, padahal sengketanya sama. Jadi, maksud pemerintah mengeluarkan Kompilasi Hukum Islam adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi para pencari keadilan di Pengadilan Agama.<sup>15</sup>

Penyusunan Kompilasi Hukum Islam dilaksanakan oleh sebuah tim pelaksana proyek yang ditunjuk dengan SKB ketua Mahkamah Agung RI dan Menteri Agama RI No.7/KMA/1985 dan No.25 Tahun 1985 tanggal 25 Maret 1985. Di dalam SKB tersebut, ditentukan para pejabat Mahkamah Agung dan

---

<sup>15</sup> Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama, *Tanya Jawab Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama, 1997), h. 157.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Departemen Agama yang ditunjuk dengan jabatan masing-masing, jangka waktu, tata kerja dan biaya yang digunakan.<sup>16</sup>

Sebagai pemimpin umum pelaksana proyek ini adalah Prof. H. Busthanul Arifin, S.H., ketua muda Mahkamah Agung RI urusan lingkungan Peradilan Agama. Disamping ada pelaksana bidang kitab/yurisprudensi, bidang wawancara dan bidang pengumpul/ pengolah data. Jangka waktu pelaksanaan proyek ditetapkan selama 2 tahun terhitung sejak saat ditetapkannya SKB. Tata kerja dan jadwal waktu pelaksanaan proyek telah ditetapkan sebagai lampiran dari SKB.

Tugas pokok proyek adalah melaksanakan usaha pembangunan Hukum Islam melalui Yurisprudensi dengan jalan Kompilasi Hukum Islam. Sasarannya mengkaji kitab-kitab yang digunakan sebagai landasan putusan-putusan hakim agar sesuai dengan perkembangan masyarakat Indonesia untuk menuju hukum nasional. Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, maka proyek pembangunan hukum Islam melalui yurisprudensi dilakukan dengan cara:

- a. *Pengumpulan data*, pengkajian kitab-kitab fiqh Islam khususnya ketiga belas kitab fiqh yang ditetapkan pemerintah menjadi pegangan Hakim Pengadilan Agama. Para ahli dari sejumlah IAIN merumuskan garis-garis hukum yang terdapat di dalam kitab-kitab itu disertai dalil-dalil hukumnya yang terdapat di dalam al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah.

---

<sup>16</sup> A. Basiq Djalil, *Peradilan Agama di Indonesia: Gemuruhnya Politik Hukum (Hukum Islam, Hukum Barat, Hukum Adat) dalam Rentang Sejarah Bersama Pasang Surut Lembaga Peradilan Agama hingga Lahirnya Peradilan Syariat Islam Aceh* (Jakarta: Kencana, 2006), h. 111.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. *Wawancara*, dengan para ulama disepuluh ibukota propinsi di Indonesia. Para ulama baik secara perorangan maupun sebagai pimpinan organisasi sosial keagamaan, mengemukakan berbagai pendapat hukumnya mengenai berbagai hal yang ditanyakan kepada mereka dan menyatakan dukungan mereka atas usaha pengumpulan atau penghimpunan kaidah-kaidah atau garis-garis hukum Islam tersebut.
- c. *Penelitian yurisprudensi Peradilan Agama*. Yurisprudensi Peradilan Agama sejak zaman Hindia Belanda dahulu sampai saat penyusunan Kompilasi Hukum Islam yang terhimpun dalam berbagai dokumen, dipelajari, dikaji dan ditarik garis-garis hukum daripadanya.
- d. *Studi perbandingan ke luar negeri*, yakni negara-negara yang penduduknya beragama Islam, mengenai hukum dan penerapan hukum Islam di negara tersebut serta sistem peradilan mereka. Hasil- hasil dari seluruh kegiatan tersebut setelah diolah dan dirumuskan, disetujui dalam lokakarya ulama Islam Indonesia pada tanggal 2 sampai 5 Februari 1988.<sup>17</sup>

Proses selanjutnya setelah naskah akhir Kompilasi Hukum Islam yang terdiri dari buku I tentang Perkawinan, buku II tentang Kewarisan dan buku III tentang Wakaf mengalami penghalusan Redaksi yang intensif di Ciawi-Bogor yang dilakukan oleh tim besar proyek untuk selanjutnya disampaikan kepada Presiden, oleh Menteri Agama dengan surat 14 Maret 1988 No:MA/123/1988 hal: Kompilasi Hukum Islam dengan maksud untuk

<sup>17</sup> Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, *Loc. Cit*



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memperoleh bentuk yuridis untuk digunakan dalam praktik di lingkungan Peradilan Agama. Kemudian lahirlah Instruksi Presiden No.1 tahun 1991.<sup>18</sup>

## B. Landasan dan Kedudukan KHI

### 1. Landasan KHI

Kompilasi Hukum Islam di Indonesia merupakan pengembangan dari Hukum Perkawinan yang tertuang di dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974. Karena itu, ia tidak dapat lepas dari misi yang diemban oleh Undang-Undang Perkawinan tersebut, kendatipun cakupannya hanya terbatas bagi umat Islam. Antara lain, kompilasi mutlak harus mampu memberikan landasan hukum perkawinan yang dapat dipegangi oleh umat Islam.<sup>19</sup>

Landasan dalam artian sebagai dasar hukum keberadaan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia adalah:

1. Instruksi Presiden No. 1 tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991; Instruksi Presiden tersebut dasar hukumnya adalah pasal 4 ayat (1) UUD 1945, yaitu kekuasaan Presiden untuk memegang kekuasaan pemerintahan negara. Ini adalah merupakan Instruksi dari Presiden RI kepada Menteri Agama untuk menyebarluaskan Kompilasi Hukum Islam yang sudah disepakati tersebut.<sup>20</sup> Diktumnya menyatakan: *Pertama* : menyebarluaskan Kompilasi Hukum Islam yang terdiri dari:

<sup>18</sup> A. Basiq Djalil, *Op. Cit.*, h. 118.

<sup>19</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo persada, 1998.h.

<sup>20</sup> Abdurrahman, *Op. Cit*, h. 53.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) Buku I tentang Perkawinan.
- 2) Buku II tentang Kewarisan.
- 3) Buku II tentang Perwakafan.

Sebagaimana telah diterima baik oleh para alim ulama Indonesia dalam lokakarya di Jakarta pada tanggal 2 sampai 5 Februari 1988 untuk digunakan oleh Instansi pemerintah dan oleh masyarakat yang memerlukannya. *Kedua:* melaksanakan Instruksi ini dengan sebaik- baiknya dan dengan penuh tanggung jawab. Sedangkan konsideran Instruksi tersebut menyatakan:

- a. Bahwa para Alim Ulama Indonesia dalam Loka Karya yang diadakan di Jakarta pada tanggal 2 sampai dengan 5 Februari 1988 telah menerima baik tiga rancangan buku Kompilasi Hukum Islam, yaitu Buku I tentang Hukum Perkawinan, Buku II tentang Hukum Kewarisan, dan Buku III tentang Hukum Perwakafan;
- b. Bahwa Kompilasi Hukum Islam tersebut dalam huruf oleh Instansi Pemerintah dan oleh masyarakat yang memerlukannya dapat digunakan sebagai pedoman dalam menyelesaikan masalah- masalah di bidang tersebut.
- c. Bahwa oleh karena itu Kompilasi Hukum Islam tersebut dalam huruf a perlu disebarluaskan.

Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia tanggal 22 Juli 1991 No. 154 tahun 1991 tentang pelaksanaan Instruksi Presiden Republik Indonesia No.1 tahun 1991.<sup>21</sup>

---

<sup>21</sup> *Ibid.*, h. 55.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Konsideran Keputusan ini menyebutkan:

- a. Bahwa Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor I Tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991 memerintahkan kepada Menteri Agama untuk menyebarluaskan Kompilasi Hukum Islam untuk digunakan oleh Instansi Pemerintah dan oleh masyarakat yang memerlukannya.
- b. Bahwa penyebaran Kompilasi Hukum Islam tersebut perlu dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh tanggung jawab.
- c. Bahwa oleh karena itu perlu dikeluarkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor I Tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991.

Dalam diktum Keputusan Menteri tersebut disebutkan sebagai berikut:

Pertama: Seluruh Instansi Departemen Agama dan Instansi pemerintah lainnya yang terkait agar menyebarluaskan Kompilasi Hukum Islam di bidang Hukum Perkawinan, Kewarisan dan Perwakafan sebagaimana dimaksud dalam diktum Pertama Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor I Tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991 untuk digunakan oleh Instansi Pemerintah dan masyarakat yang memerlukannya dalam menyelesaikan masalah-masalah di bidang tersebut.

Kedua: Seluruh lingkungan Instansi tersebut dalam diktum pertama, dalam menyelesaikan masalah-masalah di bidang Hukum Perkawinan, Kewarisan dan Perwakafan sedapat mungkin menerapkan

## 2. Kedudukan KHI

Berkenaan dengan kedudukan KHI dalam sistem Hukum nasional diukur oleh unsur-unsur sistem hukum nasional;

- a. Landasan ideal dan konstitusional KHI adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
- b. KHI dilegalisasi oleh instrumen hukum dalam bentuk Instruksi Presiden yang dilaksanakan oleh keputusan Menteri Agama, yang merupakan bagian dari peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kompilasi Hukum Islam tersebut di samping peraturan perundang-undangan lainnya.

Ketiga : Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam dan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji mengkoordinasikan pelaksanaan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia ini dalam bidang tugasnya masing-masing. Keempat: Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan.

Surat Edaran Direktur Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam atas nama Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam tanggal 25 Juli 1991 No.3694/EV/HK.003/AZ/91 yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama dan Ketua Pengadilan Agama di seluruh Indonesia tentang penyebarluasan Instruksi Presiden RI No.1 tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. KHI dirumuskan dari tatanan hukum Islam yang bersumber dari al-Qur'an dan Sunnah Rasul.
- d. Saluran dalam aktualisasi KHI antara lain Pengadilan dalam lingkungan peradilan agama.<sup>22</sup>

Kedudukan Kompilasi Hukum Islam ini mempunyai kaitan yang cukup erat dengan sifat mengikatnya Kompilasi bagi para pihak, baik pihak yang bersengketa maupun para Hakim. Baik para Hakim maupun pihak-pihak yang berperkara, dengan berlakunya Kompilasi Hukum Islam ini terikat dan berkewajiban sepenuhnya melaksanakan isinya; tanpa menutup kemungkinan bagi para Hakim Peradilan Agama untuk melakukan penemuan hukum.<sup>23</sup>

### C. Eksistensi KHI di Pengadilan Agama

Kompilasi Hukum Islam, disusun dan dirumuskan untuk mengisi kekosongan hukum substansial (mencakup hukum perkawinan, kewarisan dan perwakafan), yang diberlakukan pada Pengadilan dalam lingkungan peradilan agama; dengan demikian secara yuridis hukum Islam dibidang perkawinan, kewarisan (termasuk wasiat dan hibah) dan perwakafan menjadi hukum positif tertulis dalam system hukum nasional. Ia menjadi dasar untuk pengambilan keputusan hukum terhadap perkara-perkara yang diajukan ke Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama.<sup>24</sup>

<sup>22</sup> Cik Hasan Bisri, *Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama dalam Sistem Hukum Nasional* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), h. 9.

<sup>23</sup> Abdurrahman. *Op. Cit*, h. 62.

<sup>24</sup> Cik Bisri Hasan. *Op. Cit*, h. 2.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam hubungan dengan unsur peradilan, KHI dijadikan pedoman dalam penyelesaian perkara yang diajukan ke pengadilan dalam lingkungan peradilan agama. Hal itu dilatarbelakangi penyusunan KHI dilakukan untuk mengisi kekosongan hukum substansial yang dijadikan rujukan dalam penyelesaian perkara yang diajukan.

Berkenaan dengan hal itu, hakim sebagai penegak hukum dan keadilan, merupakan ujung tombak yang akan menerapkan KHI terhadap perkara yang diajukan kepadanya. Dengan demikian, ia dituntut untuk memahami secara lebih dalam dan komprehensif tentang substansi dan misi yang diemban oleh KHI. Dalam hal eksistensi Kompilasi Hukum Islam, kita dapat melihat beberapahal:

- a. Segi perjalanannya yang telah berjalan dikalangan Pengadilan Agama jauh sebelum diinstruksikan. Artinya, apapun namanya toh selama ini telah berjalan dengan baik.
- b. Tokoh hukum tata negara Ismail Sunny, mengakui bahwa Kompilasi Hukum Islam sebagai hukum tertulis di Indonesia, walaupun tingkat yuridisnya tidak sampai pada tingkat undang-undang, tetapi tentu akan menuju kesana. Hal ini didukung oleh tokoh ide Kompilasi Hukum Islam dalam hal ini Busthanul Arifin.<sup>25</sup>

#### D. Substansi Pasal 105 Huruf a KHI

Pasal 105 huruf a KHI memuat: “dalam hal terjadinya perceraian, pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun

<sup>25</sup> A. Basiq Djalil, *Op. Cit.*, h. 129.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

adalah hak ibunya;”<sup>26</sup> Dalam konteks itu, KHI nampaknya menggunakan alasan kebiasaan dan kelaziman anak berada dalam asuhan ibunya terutama di bawah umur 12 tahun.<sup>27</sup> Adapun pelaksanaannya, seperti yang dimaksud oleh pasal 105 huruf a KHI, ibu mendapat prioritas utama untuk mengasuhnya selama anak tersebut belum mumayyiz dan apabila si anak sudah mumayyiz maka anak disuruh memilih, kepada siapa di antara ayah dan ibunya.<sup>28</sup>

Dalam perumusan KHI, secara substansial dilakukan dengan mengacu kepada sumber hukum Islam yakni al-Qur'an dan Sunnah Rasul dan secara hirarkial mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>29</sup>

Pemeliharaan anak (*hadhanah*) merupakan salah satu isu penting yang timbul dalam perkara perceraian bagi mereka yang telah dikaruniai anak.

Peraturan perundang-undangan Indonesia, seperti antara lain terlihat jelas dalam Kompilasi Hukum Islam, mengatur pemeliharaan anak sedemikian rupa. Anak dalam KHI, diidentifikasi dalam dua kondisi. *Pertama*, anak di bawah umur (*ghairmumayyiz*), yang dalam KHI ditetapkan di bawah 12 tahun dan *kedua*, anak di atas 12 tahun (*mumayyiz*). Peraturan pemeliharaan anak dalam KHI, tidak diembel- embeli dengan syarat-syarat pihak yang berhak atas pengasuhan. Ini berbeda dengan aturan fiqh yang menetapkan bahwa seorang pengasuh harus memenuhi beberapa kriteria, jika ia ingin mendapatkan hakasuhnya.<sup>30</sup>

<sup>26</sup> Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, *Instruksi Presiden R.I. Nomor I Tahun 1991*, h. 50.

<sup>27</sup> Arskal Salim, dkk, *Mengungkap Sensitifitas Jender Hakim Agama: Sebuah Dokumentasi Program* (Jakarta: Puskumham, 2009), h. 64.

<sup>28</sup> Ahmad Rofiq, *Op. Cit.*, h. 250.

<sup>29</sup> Cik Hasan Bisri, *Loc. Cit*

<sup>30</sup> Arskal Salim, dkk, *Op. Cit.*, h. 62.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Pasal-pasal KHI tentang Hadhanah menegaskan bahwa kewajiban pengasuhan material dan non material merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Lebih dari itu, KHI malah membagi tugas-tugas yang harus diemban kedua orang tua kendatipun mereka berpisah. Anak yang belum mumayyiz tetap diasuh oleh ibunya, sedangkan pembiayaan menjadi tanggung jawab ayahnya. Kompilasi Hukum Islam juga menentukan bahwa anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak bagi ibu untuk memeliharanya, sedangkan apabila anak tersebut sudah mumayyiz, ia dapat memilih antara ayah atau ibunya untuk bertindak sebagai pemeliharanya.<sup>31</sup>

## E. Hadhanah

*Hadhanah* merupakan istilah yang digunakan dalam ilmu fiqh,

*Hadhanah* menurut istilah memiliki banyak definisi antaranya:

- a. Sayyid Sabiq dalam bukunya *Fiqh Sunnah* memberikan definisi *hadhanah* adalah melakukan pemeliharaan anak-anak yang masih kecillaki-laki ataupun perempuan yang sudah besar, tapi belum tamyiz tanpa perintah padanya, menjadikan sesuatu yang menjadikan kebaikannya, menjaganya, dari suatu yang menyakiti dan merusaknya, mendidik jasmani, rohani dan akal nya agar mampu berdiri sendiri menghadapi hidup dan memikul tanggung jawabnya.<sup>32</sup>

<sup>31</sup> Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, h. 303.

<sup>32</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Penerjemah Mohammad Thalib, Judul Asli *Fiqh assunnah*, (Bandung: PT al-Ma'arif, 1980), cet. ke-8, h. 173.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- b. Abdul Azis Dahlan dalam buku *Ensiklopedi Hukum Islam* dikatakan bahwa *hadhanah* merupakan suatu kewenangan untuk merawat dan mendidik seorang yang belum mumayyiz atau orang dewasa tetapi kehilangan akal (kecerdasan berpikir) nya. Ulama fiqh menetapkan bahwa kewenangan seperti itu lebih tepat dimiliki oleh kaum wanita karena naluri kewanitaan mereka lebih sesuai untuk merawat dan mendidik anak, serta kesabaran mereka dalam menghadapi permasalahan kehidupan anak-anak lebih tinggi dibandingkan kesabaran seorang laki-laki.<sup>33</sup>
- c. Menurut Amir Syarifuddin dalam buku *Hukum Perkawinan di Indonesia* menyatakan bahwa istilah *hadhanah* mencakup beberapa hal, di antaranya perihal siapa yang lebih berhak terhadap pengasuhan anak dan siapa pula yang bertanggung jawab atas biaya pemeliharaan anak hingga anak tersebut mampu berdiri sendiri.<sup>34</sup>

Pemeliharaan anak adalah pemenuhan untuk berbagai aspek kebutuhan primer dan sekunder anak. Pemeliharaan anak meliputi berbagai aspek yaitu pendidikan, biaya hidup kesehatan, ketentraman dan segala aspek yang berkaitan dengan kebutuhannya. Dalam ajaran Islam diungkapkan bahwa tanggung jawab ekonomi berada dipundak suami sebagai kepala rumah tangga, dan tidak tertutup kemungkinan tanggung jawab itu beralih kepada istri untuk membantu suaminya apabila suami tidak mampu melaksanakan kewajibannya.

<sup>33</sup> Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), cet. ke-1, h. 415.

<sup>34</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Kencana: Prenada Media, 2006), cet. ke-3, h. 328.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Oleh karna itu amat penting mewujudkan kerjasama dan saling membantu antara suami istri dalam memelihara anak sampai dewasa. Hal yang dimaksud pada prinsipnya adalah tanggung jawab suami istri kepada anak-anaknya.<sup>35</sup>

Jika ditinjau dari segi syara' maka artinya menjaga dan mengasuh anak kecil dari hal yang membahayakan dan berusaha mendidik dan melakukan hal-hal yang bermanfaat untuk kebutuhan jasmani dan rohaninya. Dari definisi-definisi di atas dapat disimpulkan bahwa *hadhanah* adalah pemeliharaan anak yang masih kecil setelah terjadinya perceraian antara kedua orang tuanya atau suatu pekerjaan untuk mengurus kepentingan anak-anak baik laki-laki atau perempuan yang belum mumayyiz atau yang sudah dewasa tapi belum mampu mengurus diri dan urusannya sendiri karena kehilangan kecerdasannya.

Hadhanah ini dilakukan oleh seorang wanita yang mempunyai hak hadhanah, hal ini dilakukan dalam segala kepentingan anak asuh seperti pakaian, makanan, kesehatan jasmani dan rohani, mendidiknya agar dia mampu mengurus dirinya sendiri untuk hidup dan bertanggung jawab atas dirinya sendiri.

Mengasuh anak-anak yang masih kecil hukumnya wajib, sebab mengabaikannya berarti menghadapkan anak-anak yang masih kecil kepada bahaya kebinasaan. Hadhanah merupakan hak bagi anak-anak yang masih kecil, karena ia masih membutuhkan pengawasan penjagaan, pelaksanaan

---

<sup>35</sup> Zainudin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), cet. ke-3, h. 64.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

urusannya dari orang yang mendidiknya. Dalam kaitan ini terutama ibunya yang berkewajiban melakukan hadhanah.<sup>36</sup>

Seseorang yang menjadi pengasuh anak baik anak tersebut yatim atau tidak ia berkewajiban untuk memelihara anak tersebut dari hal yang merugikannya, baik ia rugi dalam hal pendidikan dalam arti tidak menikmati pendidikan, tidak memiliki kesehatan dan lain sebagainya. Apalagi anak tersebut ditinggalkan dengan harta yang cukup oleh orang tuanya. Kewajiban bagi pengasuh anak untuk memelihara hak anak tersebut terhadap hartanya. Suatu keharusan bagi orang tua untuk memberikan wasiat kepada orang yang dapat dipercaya dalam hal pengasuhan anak agar ada kemaslahatan bagi anak dan anak tidak tersia-siakan.

Dalam UU No.1 tahun 1974 tentang perkawinan yang berlaku di Indonesia. Mengenai kewajiban terhadap anak yang terdapat dalam pasal 45 yaitu:

- a. Kedua orang tua wajib memelihara anak-anak mereka sebaik-baiknya.
- b. Kewajiban orang tua yang disebut dalam pasal (1) berlaku sampai anak kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban yang mana berlaku meskipun perkawinan kedua orang tuanya telah putus.<sup>37</sup>

Berdasarkan pasal-pasal tersebut di atas dapat diambil kesimpulan bahwa menurut Undang-Undang Perkawinan, kedua orang tua mempunyai kewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya sampai kawin atau

<sup>36</sup> Tihami dan Sahari Sahrani, *Fiqh Munakahat: Kajian Fiqh Nikah Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), cet. ke-7, h. 217.

<sup>37</sup> Departemen Agama RI, *Himpunan Perundang-undangan Perkawinan*, (Jakarta: Aneka Ilmu, 2001), cet. ke-3, h. 22.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mampu berdiri sendiri. Ayah yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan. Dalam hal ini Pengadilan dapat menentukan hal-hal yang berkenaan dengan masalah *hadhanah*, baik kepada ayah maupun kepada ibu. Kewajiban *hadhanah* yang dimaksud di atas adalah tetap berlaku meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus (cerai).

Sejak adanya Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 154 Tahun 1991 (tanggal 21 Juli 1991) tentang pelaksanaan Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 (10 Juni 1991) tentang Kompilasi Hukum Islam telah dijadikan pedoman dalam menyelesaikan masalah-masalah di bidang hukum perkawinan, kewarisan, dan perwakafan di seluruh lingkungan instansi Departemen Agama dan instansi pemerintahan lainnya yang terkait, serta masyarakat yang memerlukannya. Mengenai masalah *hadhanah* dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) diatur dalam beberapa pasal tentang hukum perkawinan. Adapun hal-hal yang diatur dalam masalah *hadhanah* adalah:

1. Pengertian *hadhanah* menurut Pasal 1 (G): pemeliharaan anak atau *hadhanah* adalah kegiatan mengasuh, memelihara dan pendidikan anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri.<sup>38</sup>
2. Kewajiban orang tua dalam *hadhanah*. Menurut Pasal 77 (3): suami siteri memikul kewajiban untuk mengadakan (mengasuh) dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya. Dalam Pasal

---

<sup>38</sup> Departemen agama RI, *Kompilasi Hukum Islam*, Direktorat Kelembagaan Agama Islam, 1997/ 1998, h. 84.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

80 (4) dijelaskan: sesuai dengan penghasilannya, suami menanggung:a. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan pengobatan isteri dan anaknya.b. Biaya pendidikan bagi anak.Selanjutnya Pasal 104 (1): Semua biaya penyusunan anak dipertanggung jawabkan kepada ayahnya. Apabila ayahnya telah meninggal dunia, maka biaya penyusunan dibebankan kepada orang yang berkewajiban memberi nafkah kepada ayahnya atau walinya.

3. *Hadhanah* setelah terjadinya perceraian. Dalam Pasal 105 ayat A dan C dalam hal terjadinya perceraian sebagai berikut :

- a. Pemeliharaan anak yang belum *mumayiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya.
- b. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.

Dalam kitab Undang-undang hukum perdata bab ke empat belas, bagian kedua A Tentang Pembebasan dan Pemecatan Orang Tua Dalam Pasal 319 H dan 319 F . Pada pasal 319 H: Jika anak-anak belum dewasa itu tidak senyatanya telah berada dalam kekuasaan orang tua atau kekuasaan pengurus perhimpunan yayasan atau lembaga amal, yang menurut sesuatu putusan hakim termaksud dalam bagian ini diwajibkan melakukan kekuasaan orang tua perwalian, ataupun tidak telah berada dalam kekuasaan orang atau kekuasaan dewan perwalian, kepada kiranya anak-anak itu menurut penetapan termaksud dalam pasal 319 F ayat kelima dipercayakannya, maka dalam keputusan yang sama harus diperintahkan

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

juga menyerahkan anak-anak itu kepada pihak yang menurut keputusan mendapat kekuasaan atas anak-anak itu.<sup>39</sup>

Dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan anak bagian ke empat kewajiban dan tanggung jawab keluarga dan orang tua dalam Pasal 26 yang isinya:

1. Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:
  - a. Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak.
  - b. Menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya.
  - c. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia dini.
2. Dalam hal orang tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena sesuatu sebab tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, maka kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat beralih kepada keluarga, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.<sup>40</sup>

#### F. Tinjauan Umum Keadilan, Kepastian Hukum, dan Kemanfaatan

##### 1. Keadilan

Sesungguhnya konsep keadilan sangat sulit mencari tolak ukurnya karena adil bagi satu pihak belum tentu dirasakan oleh pihak lainnya. Kata keadilan berasal dari kata adil, yang berarti dapat diterima secara

<sup>39</sup> Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: PT Pradnya Paramita, 2008, h. 85.

<sup>40</sup> *Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2004 tentang kekerasan dalam rumah tangga dan Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*, Yogyakarta: Bening, Cet. Ke-1, 2010, h. 72

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

obyektif.<sup>41</sup> Menurut Aristoteles, ada beberapa pengertian keadilan, antara lain yakni: Keadilan berbasis persamaan, distributif, dan korektif.

*Keadilan berbasis persamaan*, didasarkan atas prinsip bahwa hukum mengikat semua orang, sehingga keadilan yang hendak dicapai oleh hukum dipahami dalam konteks kesamaan. Kesamaan yang dimaksudkan disini terdiri dari atas kesamaan numerik dan kesamaan proporsional. Kesamaan numerik berprinsip kesamaan derajat atas setiap orang di hadapan hukum, sedangkan kesamaan proporsional adalah memberi kepada setiap orang apa yang sudah menjadi haknya.

*Keadilan distributif*, hal ini identik dengan keadilan proporsional, dimana keadilan distributif berpangkal pada pemberian hak sesuai dengan besar kecilnya jasa, sehingga dalam hal ini keadilan didasarkan pada persamaan, melainkan sesuai dengan porsi masing-masing (proporsional).

*Keadilan korektif*, pada dasarnya merupakan keadilan yang bertumpu pada pembetulan atas suatu kesalahan, misalnya apabila ada kesalahan orang yang menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka orang yang mengakibatkan munculnya kerugian, harus memberikan ganti rugi (kompensasi) kepada pihak yang menerima kerugian untuk memulihkan keadaannya sebagai akibat dari kesalahan yang dilakukan.<sup>42</sup>

<sup>41</sup> Algra, dkk., *Mula Hukum*, (Jakarta: Binacipta, 1983). h. 7.

<sup>42</sup> Ahmad Fadlil Sumadi, "Hukum dan Keadilan Sosial" dikutip dari <http://www.suduthukum.com>

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2. Kepastian Hukum

Menurut Syafruddin Kalo mengatakan bahwa, “kepastian hukum dapat kita lihat dari dua sudut, yaitu kepastian dalam hokum itu sendiri dan kepastian karena hukum.” Lebih lanjut beliau memaparkan, Kepastian dalam hukum dimaksudkan bahwa setiap norma hukum itu harus dapat dirumuskan dengan kalimat-kalimat didalamnya tidak mengandung penafsiran yang berbeda-beda, Akibatnya akan membawa perilaku patuh atau tidak patuh terhadap hukum.

Dalam praktek banyak timbul peristiwa peristiwa hukum, di mana ketika dihadapkan dengan substansi norma hukum yang mengaturnya, kadangkala tidak jelas atau kurang sempurna sehingga timbul penafsiran yang berbeda beda yang akibatnya akan membawa kepada ketidak pastian. Apabila kepastian hukum diidentikkan dengan perundang undangan, maka salah satu akibatnya adalah kalau ada bidang kehidupan yang belum diatur dalam perundang-undangan, maka hukum akan tertinggal oleh perkembangan masyarakat. Oleh sebab itu dalam proses penegakan hukum perlu memperhatikan kenyataan hukum yang berlaku. Sehingga kepastian hukum dalam hal ini berguna untuk menciptakan ketertiban masyarakat.

Makna sederhana artinya caranya yang jelas, mudah dipahami dan tidak berbelit. Yang penting disini ialah agar para pihak dapat mengemukakan kehendaknya dengan jelas dan pasti (tidak berubah-ubah) dan penyelesaiannya dilakukan dengan jelas, terbuka runtut dan pasti, dengan penerapan hukum acarayang fleksibel demi kepentingan para



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pihak yang menghendaki acara yang sederhana. Apa yang sudah sederhana, jangan sengaja dipersulit oleh hakim kearah proses pemeriksaan yang berbelit-belit dan tersendat-sendat. Terkait dengan cepat ialah suatu proses pemeriksaan yang relatif tidak memakan jangkawaktu yang lama sampai bertahun-tahun sesuai dengan kesederhanaan hukum acara itu sendiri. Sedangkan biaya ringan disini mengacu pada banyak atau sedikitnya biaya yang harus dikeluarkan oleh pencari keadilan dalam menyelesaikan sengketa di depan pengadilan.

Dalam hal ini berarti tidak dibutuhkan biaya lain kecuali benar-benar diperlukan secara riil untuk penyelesaian perkara. Biaya harus ada tarif yang jelas dan seringannya. Segala pembayaran dipengadilan harus jelas kegunaannya dan diberi tanda terima uang. Pengadilan harus mempertanggung jawabkan uang tersebut kepada yang bersangkutan dengan mencatatkannya dalam jurnal keuangan perkara sehingga yang bersangkutan dapat melihatnya sewaktu-waktu.

### 3. Kemanfaatan

Masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakan hukum. Hukum itu untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakkan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Jangan sampai justru karena hukumnya dilaksanakan atau ditegakkan malah akan timbul keresahan di dalam masyarakat itu Putusan hakim akan mencerminkan kemanfaatan, manakala hakim tidak saja menerapkan hukum secara tekstual belaka dan hanya mengejar keadilan semata, akan tetapi juga mengarahkan pada kemanfaatan bagi

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kepentingan pihak-pihak yang berperkara dan kepentingan masyarakat pada umumnya. Artinya, hakim dalam menerapkan hukum, hendaklah mempertimbangkan hasil akhirnya nanti, apakah putusan hakim tersebut membawa manfaat atau kegunaan bagi semua pihak.<sup>43</sup>

#### 4. Hubungan Antara Keadilan, kepastian Hukum, dan Kemanfaatan

Penegakan hukum pada prinsipnya harus dapat memberi manfaat atau berdaya guna (utility) bagi masyarakat, namun disamping itu masyarakat juga mengharapkan adanya penegakan hukum untuk mencapai suatu keadilan. Keadilanpun demikian tidak dapat kita pungkiri, bahwa apa yang dianggap berguna(secara sosiologis) belum tentu adil, begitu juga sebaliknya apayang dirasakan adil (secara filosofis), belum tentu berguna bagi masyarakat.

Menurut Sudikno Mertokusumo sebagaimana dikutip oleh Syafruddin kalo mengatakan bahwa, Dalam pelaksanaan penegakan hukum, keadilan harus diperhatikan, namun hukum itu tidak identik dengan keadilan,hukum itu bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan. Setiap orang yang mencuri harus dihukum tanpa membedakan siapa yang mencuri. Sebaliknya keadilan bersifat subjektif, individualistis dan tidak menyamaratakan.<sup>44</sup>

<sup>43</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty,2005), h. 160.

<sup>44</sup> Syafruddin, Kalo. "Penegakan Hukum yang Menjamin Kepastian Hukum dan Rasa keadilan Masyarakat" dikutip dari <http://www.academia.edu.com> .

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

1. Bahwa penerapan pasal 105 KHI di Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci mengacu kepada kronologis perkara, fakta hukum serta peristiwa hukum yang terbukti dan muncul dalam persidangan sehingga penerapan pasal 105 KHI tidak diterapkan secara serta merta melainkan melihat aspek-aspek yang lain.
2. Bahwa kedudukan Pasal 105 KHI secara tekstual mengatur, bagaimanapun ibu mempunyai hak mutlak untuk mendapatkan hak asuh anak pasca perceraian, namun apabila hal ini dipaksakan secara kaku maka hukum tidak menjadi solusi bagi masyarakat, sehingga syarat utama yang perlu dipenuhi agar Pasal 105 KHI tercapai tujuan dan maksudnya maka ibu sebagai pemegang amanah secara aturan harus bisa menunjukkan segala sesuatu utamanya perilaku yang bisa menjamin keberlangsungan hidup anak, sedangkan tanggung jawab sebagai orang tua, hal ini tetap melekat kepada keduanya tidak ada yang terlepas bahkan dilepaskan;

#### B. Saran

1. Kepada masyarakat, apabila terjadi perceraian jangan dipermasalahkan tentang siapa yang berhak untuk mendapatkan hak asuh anak . Karena setiap pasangan suami istri yang telah bercerai masing-masing masih berhak atas anak-anak tersebut. Kalaupun harus menyelesaikan hal

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tersebut, sebaiknya diselesaikan dengan cara kekeluargaan, karena di takutkan atas hal tersebut menimbulkan dampak yang buruk bagi sang anak.

2. Kepada aparat penegak hukum khususnya Hakim di lingkungan Peradilan Perdata untuk selalu mengedepankan Asas keadilan, Kepastian Hukum, dan kemanfaatan di setiap keputusan, Meskipun dalam praktik sangat sulit namun harus tetap dijalankan secara seimbang dan profesional.





## DAFTAR PUSTAKA

- A. Basiq Djalil. *Peradilan Agama di Indonesia: Gemuruhnya Politik Hukum (Hukum Islam, Hukum Barat, Hukum Adat) dalam Rentang Sejarah Bersama Pasang Surut Lembaga Peradilan Agama hingga Lahirnya Peradilan Syariat Islam Aceh*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996).
- Abdurrahman. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Akademia Presindo, 2007.
- Ahmad Fadlil Sumadi, "Hukum dan Keadilan Sosial" dikutip dari <http://www.suduthukum.com>
- Ahmad Rofiq. *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo persada, 1998.
- Algra, dkk. *Mula Hukum*. Jakarta: Binacipta, 1983.
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Kencana: Prenada Media, 2006).
- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012).
- Amiruddin, dan Asikin Zainal. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 2012.
- Amzie, *Analisis Data Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010).
- Badai Husain Hasibuan dan Rahmi Purnama Melati, "Asas Kepastian Hukum Dalam Peradilan Indonesia."
- Budi Winarno, *Sistem Politik Indonesia Era Reformasi*, (Medpress (Anggota IKAPI), Yogyakarta, 2008)
- Budi Winarno. *Sistem Politik Indonesia Era Reformasi*. Medpress Anggota IKAPI, Yogyakarta, 2008.
- Cik Bisri Hasan. *Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama dalam Sistem Hukum Nasional*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999.
- Departemen agama RI, *Kompilasi Hukum Islam*, Direktorat Kelembagaan Agama Islam, 1997/ 1998.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Depertemen Agama RI, *Himpunan Perundang-undangan Perkawinan*, (Jakarta: Aneka Ilmu, 2001).

*Himpunan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam*. Grahamedia Press, 2014.

<https://www.kejari-bone.go.id/artikel/detail/1/analisa-konsep-keadilan-kepastian-dan-kemanfaatan-dalam-penegakan-hukum-tindak-pidana-pertambangan.html>

Sayyid Sabiq. *Fiqh Sunnah*, Penterjemah Mohammad Thalib, Judul Asli *Fiqh assunnah*. Bandung: PT al-Ma'arif, 1980.

Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: PT Pradnya Paramita, 2008. Sumiyati, Lilis. "Murtad sebagai penghalang hadanah. Studi analisis putusan pengadilan agama Jakarta Timur perkara nomor 1700/Pdt.G/2010/PA.JT.Skripsi--", UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2015".

Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 2005).

Syafruddin Kalo. "Penegakan Hukum yang Menjamin Kepastian Hukum dan Rasa keadilan Masyarakat" dikutip dari <http://www.academia.edu.com> diakses 10 April 2019.

Tihami, dan Sahrani Sahari. *Fiqh Munakahat: Kajian Fiqh Nikah Lengkap*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.

Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*. Bandung: CV Nuansa Aulia.

*Undang-Undang Perkawinan*, Surabaya: Pustaka Tinta Emes, 1997.

*Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2004 tentang kekerasan dalam Rumah Tangga dan Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*, Yogyakarta: Bening.

Wahba Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adilatuhu*, Jilid 9. Jakarta: Gema Insani, 2011. Azis, Abdul Dahlan. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996.

Zainudin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009).



## DOKUMENTASI

### A. Dokumentasi Wawancara dengan Hakim di PA. Pangkalan Kerinci

Tema : Penerapan Pasal 105 Khi Terhadap Hak Asuh Anak Di

Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci

Nama : Farida Nur Aini, S.Ag, M.H.

Waktu : 14.00 – 16.00

Lokasi : Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci

1. Bagaimana Penerapan pasal 105 KHI tentang Hak Asuh Anak di Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci?

Perkara Hak Asuh Anak adalah Perkara yang berkaitan dengan Hak untuk Mengasuh , memelihara dan membesarkan Anak sesuai dengan Putusan Pengadilan Pasca Perceraian yang diajukan baik ibu atau ayahnya. Karena kita sebagai wilayah Peradilan Agama, maka acuan kita adalah Kompilasi Hukum Islam Pasal 105, yang mana disitu sudah diatur secara jelas, namun sekarang lebih dikuatkan lagi dengan adanya Undang-undang Perlindungan Anak, akan tetapi yang lebih baik ya tetap memakai KHI. Dalam KHI Pasal 105 ada batasanya yaitu umur 12 tahun, yang mana dalam hal ini Ibu diberikan legal standing untuk mengasuh. Ibu bisa menjalankan haknya apabila ibu tidak terhalang oleh hal-hal yang ditentukan syar'i. Yang harus kita lihat adalah masa depan dan kepentingan anak. Ketika anak tidak baik dengan ibu maka hak ini akan berpindah kepada ayahnya, yang jelas tujuannya adalah sebagai perlindungan kepada anak.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Bagaimana Kedudukan pasal 105 KHI terhadap Hak Asuh Anak di Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci?

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Bahwa menyikapi sebuah permasalahan yang berkaitan dengan perkara hak asuh anak, kebijakan atau putusan yang harus dikedepankan adalah untuk kemasalahatan dan perlindungan anak itu sendiri, kalau sepanjang duaduanya sama, maka kembali ke pasal 105 KHI. Unsur yang dilihat adalah keadaan orang tua, kemampuan baik ekonomi akhlak, dan lingkungan itu sebagai pertimbangan yang diambil. Dalam hal menilai pokok perkara, terlebih dahulu melihat fakta hukum (formil), yaitu yang pandai menyajikan data dipersidangan, jika salah ada yang bisa membuktikan yaitu yang akan kita berikan, sehingga dalam mengambil kesimpulan dari runtutan sidang yang telah digelar Hakim Melihat fakta dalam persidangan baru melihat aturan lalu diambilah keputusan.

Bahwa Ketika antara pihak Penggugat ataupun Tergugat sama- sama bisa membuktikan dalilnya dan sama-sama kuatnya cara hakim memutuskan sebuah perkara, maka hakim menggunakan istilah ushul fiqh diantara yang baik pasti ada yang baik, dalam hal ini dikembalikan kepada hati nurani hakim. Namun pasti akan terlihat sisi positif dan negatif, dan yang tidak kalah penting Pedomannya siapa yang mendalilkan harus membuktikan, ketika dalilnya dibantah oleh lawannya, dan tidak bisa membuktikan maka dalil tersebut akan gugur begitupun sebaliknya.

Selanjutnya berbicara makna dan arti yang terkandung dalam pasal 105 KHI itu mengatur tentang perselisihan antara ibu dan bapak, jika dilihat dari pasal itu ibu memang yang lebih berhak, namun ini hanya sampai umur 12

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



tahun, setelah itu anak dipersilahkan untuk memilih dengan siapa dengan cara dihadirkan dimuka persidangan dan apa yang menjadi pilihan anak itu akan menjadi pertimbangan hukum oleh hakim, pasal tersebut sudah mengandung unsur-unsur keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum, namun jika diterapkan dalam era sekarang pasal-pasal tersebut bisa disimpangi dengan melihat kemaslahatan kehidupan anak.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**LEMBAR PENGESAHAN  
PERBAIKAN SKRIPSI**

Skrripsi dengan judul **“PENERAPAN PASAL 105 KOMPILASI  
HUKUM ISLAM TERHADAP HAK ASUH ANAK OLEH HAKIM DI  
PENGADILAN AGAMA PANGKALAN KERINCI”**, yang ditulis oleh:

Nama : **ANDRI SAPUTRA**  
NIM : **11721102877**  
Program Studi : **Hukum Keluarga**

Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah  
Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 29 Oktober 2021  
**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

Ketua (Penguji I)  
**Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc. MA**

Sekretaris (Penguji II)  
**Muslim, S. Ag. S.H. M. Hum**

Penguji III  
**Khairul Amri, M. Ag**

Penguji IV  
**Mardiana, MA**

Mengetahui :  
Kepala Bagian Akademik Kemahasiswaan dan Alumni  
Fakultas Syariah dan Hukum

**Jalinus, S.Ag**  
NIP. 19750801 200701 1 023

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**PENGADILAN AGAMA PANGKALAN KERINCI**

Jl. Hang Tuah No. Telp/Fax: 0761-7000 533 / Fax : 493458  
Pangkalan Kerinci – Kabupaten Pelalawan  
Email: [pa\\_pkc@yahoo.co.id](mailto:pa_pkc@yahoo.co.id)

Kode Pos: 28300

Nomor : W4-A15/ 840 /PB.00/VI/2021  
Lampiran : 1 lembar  
Perihal : Mohon Izin Riset

30 Juni 2021

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau  
di

Pekanbaru

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan surat Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Nomor: Un.04/F.I/PP.00.9/3255/2021 tanggal 01 April 2021, perihal sebagaimana pada pokok surat, pada prinsipnya kami dapat memberikan izin/rekomendasi untuk melakukan Riset di Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci kepada:

N a m a : Andri Saputra  
NPM : 11721102877  
Prodi : Hukum Keluarga (Ahwal Syaksyah) S1  
Semester : VIII (Delapan)  
Lokasi : Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci  
Judul Skripsi : Penerapan Hak Asuh Anak oleh Hakim di Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci Terhadap Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam.

Demikian kami sampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya, terima kasih.



Wassalam,  
Wakil Ketua,

Parida Nur Aini, S.Ag., M.H.  
NID. 19770922.200604.2.004

UIN SUSKA RIAU





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**PUTUSAN**

**Nomor 307/Pdt.G/2019/PA.Pkc**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

**Pemohon**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan S1 Teknik, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Kecamatan Langgam, Kabupaten Pelalawan, sebagai **Pemohon**;  
melawan

**Termohon**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan D1 Komputer, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon, dan memeriksa alat bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya mengajukan cerai terhadap Termohon tanggal 01 Agustus 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci dengan Nomor 307/Pdt.G/2019/PA.Pkc, tanggal 01 Agustus 2019 dengan dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 05 Maret 2010, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kabupaten Padang, Provinsi Sumatera Barat, sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: -, tertanggal 05 Maret 2010, yang di keluarkan oleh KUA Kabupaten Padang, Provinsi Sumatera Barat;





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



### Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### MENGADILI

##### Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci;
3. Menetapkan anak yang bernama **Anak I Pemohon dan Termohon**, lahir tanggal 26 Mei 2011 dan **Anak II Pemohon dan Termohon**, lahir tanggal 03 Mei 2012 dibawah asuhan Hadhanah Pemohon;

##### Dalam Rekonvensi

Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;

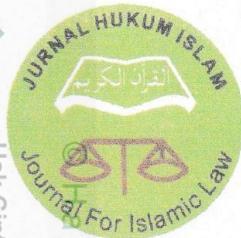
##### Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp266.000,00 (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 shafar 1441 Hijriyah, oleh kami **Baginda, S.Ag., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Amri Yantoni, S.H.I., M.A.**, dan **Mardiyyatul Husnah, S.H.I., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 shafar 1441 dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Muslim, S.Ag., M.H.** sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri Penggugat dan Tergugat;

Majelis Hakim Anggota

Ketua Majelis



# JURNAL HUKUM ISLAM

مجلة الأحكام الشرعية

## Journal For Islamic Law

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM 18 Simpang Baru, Panam Pekanbaru 28293

Po. Box 1004 Telp. (0761) 561645 Fax. (0761) 562052

www. Jurnalhukumislam.com email. admin@jurnalhukumislam.com

HP. 081275158167 – 085213573669

### SURAT KETERANGAN

Pengelola Jurnal Hukum Islam dengan ini menerangkan bahwa:

**NAMA : ANDRI SAPUTRA**

**NIM : 11721102877**

**JURUSAN : HUKUM KELUARGA**

**JUDUL : PENERAPAN PASAL 105 KOMPILASI HUKUM ISLAM TERHADAP HAK ASUH ANAK OLEH HAKIM DI PENGADILAN AGAMA PANGKALAN KERINCI**

**Pembimbing: Ahmad Fauzi, SHL., MA**

Nama tersebut diatas telah menyerahkan jurnal Skripsi sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.

Pekanbaru, 04 November 2021

Pimpinan Redaksi



**Dr. M. ALPI SYAHRIN, SH., MH., CPL.**  
NIP. 19880430 201903 1 010

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BIOGRAFI



Andri saputra, ia lahir di Sialang Godang, 13 Juni 1999, Pria yang kerap disapa Andri yang merupakan putra dari pasangan Samsuar dan Emi. Ia anak pertama dari dua bersaudara. Semasa anak-anak, remaja hingga tumbuh dewasa, Ia menghabiskan waktunya di kampung halaman, tepatnya di Kabupaten Pelalawan, Kecamatan Bandar Petalangan, Desa Sialang Godang.

Seperti anak-anak pada umumnya, Ia menekuni bidang pendidikan mulai dari pendidikan formal di Sekolah Dasar Negeri (SDN) 007 Sialang Godang, masuk sekolah pada tahun 2005 selesai pada tahun 2011. Kemudian ia melanjutkan pendidikannya di sekolah menengah pertama negeri (SMPN) Bandar Petalangan, Selesai pada tahun 2015, Pada sekolah yang sama ia melanjutkan pendidikannya di Sekolah Menengah Atas (SMAN) Bandar Petalangan, dan selesai pada tahun 2017.

Setelah itu, ia melanjutkan studynya di perguruan tinggi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim (UIN SUSKA) Riau, Sebelumnya ia juga sempat mendaftar di Universitas Riau (UNRI). Namun ia dinyatakan tidak lulus di Universitas tersebut, Tetapi ia tidak berputus asa, Ia selalu ingin mencoba sampai keinginannya untuk melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi bisa tercapai, Kemudian ia mendaftar lagi di Universitas Negeri Sultan Syarif Kasim(UIN SUSKA) Riau, Dan alhamdulillah ia dinyatakan lulus di Universitas tersebut dengan jurusan Hukum Keluarga. Ia mulai kuliah pada tahun 2017 dan selesai pada tahun 2021.

UIN SUSKA RIAU